



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 100
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kegiatan indikator kegiatan dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran Pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 100) terkait kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

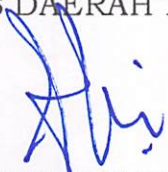
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 JUNI 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 92

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Bazarn	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Bazarn, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2025		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, Ekonomi Bangsa dan Masyarakat Berkeadilan dan Keadilan Sosial				Perentase Pemurnaan Angka Kematian	0.16%			0.19%		0.20%		0.21%		0.23%		0.24%		0.24%		
				Perentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan	Na			2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		10.00%		
		8 01 02	PROGRAM PERKUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KESABANGSAAN	Perentase Peningkatan Jumlah Masyarakat yang paham terhadap wawasan kebangsaan	2%	2%	693,971,800	2%	693,971,800	-	763,368,980	-	800,987,429	-	840,486,800	-	881,961,140	4%	4,674,747,949	
				Perentase Peningkatan Pemahaman Ideologi	na	-		-		2%		2%		2%		2%		8%		
				Perentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	na	-		-		2%		2%		2%		2%		8%		
				Perentase Peningkatan Pemahaman Karakter Bangsa	na	-		-		2%		2%		2%		2%		8%		
		8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perentase perumusan kebijakan teknis bidang bina ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang sesuai ketentuan	na	100%	693,971,800	100%	693,971,800	100%	763,368,980	100%	800,987,429	100%	840,486,800	100%	881,961,140	100%	4,674,747,949	
		8 01 02 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	1 kali	1 kali	157,841,800	1 kali	157,841,800	-	76,616,960	-	80,447,829	-	84,470,220	-	88,693,731	2 kali	645,992,360	
				Jumlah Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1 kali	1 kali		1 kali		-		-		-		-		2 kali		
				Jumlah Kegiatan Dialog Pembauran Kebangsaan	1 kali	1 kali		1 kali		-		-		-		-		2 kali		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-		-		4500 orang		4500 orang		4500 orang		4500 orang		18000 orang		
				Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang terlaksana	-	-		-		45 kali		45 kali		45 kali		45 kali		180 kali		
		8 01 02 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	12 kali	6 kali	336,090,000	12 kali	486,090,000	-	673,732,000	-	709,539,600	-	745,016,580	-	782,267,409	18 kali		
				Jumlah Rapat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	12 kali	6 kali		12 kali		-		-		-		-		18 kali		
				Jumlah Rapat Forum Pembauran Kebangsaan	12 kali	6 kali		12 kali		-		-		-		-		18 kali		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-		-		178 Orang		178 Orang		178 Orang		178 Orang		712 orang		
				Jumlah Laporan Koordinasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	12 Laporan	-		-		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan		
				Jumlah Laporan Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	12 Laporan	-		-		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan		
				Jumlah Laporan Koordinasi Pembauran Kebangsaan	12Laporan	-		-		12Laporan		12Laporan		12Laporan		12Laporan		48 Laporan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	12 Laporan	-	-	12 Laporan	30.000,000	-	11.000,000	-	11.000,000	-	11.000,000	-	11.000,000	12 Laporan	-	-	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan 12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	48 Laporan	-	-	
	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat			Persentase peningkatan pemahaman politik	10%	-	10%	-	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-	50%	-	-	
		6.01.03	PROGRAM PEMBERKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pempol Pencapaian Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai standar	100%	100%	1.200,930,889	100%	1.200,930,889	-	2.630,332,200	-	1.632,357,540	-	1.633,896,901	-	1.635,590,198	100%	9.934,038,617	-	
				Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan	70%	-	-	-	-	70%	-	80%	-	85%	-	90%	-	90%	-	-	
				Persentase koordinasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik yang terlaksana	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik yang sesuai ketentuan	100%	100%	1.200,930,889	100%	1.200,930,889	100%	2.630,332,200	100%	1.632,357,540	100%	1.633,896,901	100%	1.635,590,198	100%	9.934,038,617	-	
		6.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di bidang politik sesuai ketentuan	1 Laporan	1 laporan	1.500,000	1 laporan	1.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	3.000,000	-	
		6.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Fasilitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	1 kali	1 kali	1.188,208,889	1 kali	1.188,208,889	-	2.616,338,000	-	1.616,963,920	-	1.616,963,920	-	1.616,963,920	2 kali	9.843,647,538	-	

Tujuan	Sasaran	Muda	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode reastra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Sosialisasi Perundang-Peraturan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	1 kali	1 kali		1 kali										2 kali		
				Jumlah penerima hibah	10 Parpol	10 Parpol		10 Parpol										10 Parpol		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-			3640 Orang			3640 Orang		3640 Orang		3640 Orang		14560 Orang		
				Jumlah peserta kegiatan yang telah tentang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	100 orang	-			2548 orang			2548 orang		2548 orang		2548 orang		10192 orang		
				Jumlah fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pada partai politik	1 kali	-			1 kali			1 kali		1 kali		1 kali		4 kali		
				Jumlah Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	10 Parpol	-			10 Parpol			10 Parpol		10 Parpol		10 Parpol		10 Parpol		
		8.01.03.2.01.04	Polikordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Verifikasi kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD	6 kali	6 kali	11,222,000	6 kali	9,000,000	-	10,889,890	-	11,978,879	-	13,176,700	-	14,494,442	12 kali	70,761,977	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-			880 Orang			880 Orang		880 Orang		880 Orang		3520 orang		
				Jumlah partai politik yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan	10 parpol	-			10 parpol			10 parpol		10 parpol		10 parpol		40 parpol		
		8.01.03.2.01.05	Polikordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	-		1 laporan	2,222,000	-	3,104,310	-	3,414,741	-	3,756,215	-	4,131,836	1 laporan	16,629,102	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan	-					1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan			

Tujuan	Batasan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Batasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode rencana pertanggal daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya rasa keadilan berbagai kalangan dan			Perentase peningkatan ormas yang terlibat administrasi	Ra			12%		12%		13%		13%		14%		52%		
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perentase Peningkatan Organisasi masyarakat/ LKM yang memiliki Surat Keterangan Keberadaan Organisasi	10%	100%	88,962,800	100%	88,962,800	12%	97,559,080	13%	102,752,034	13%	107,589,636	14%	113,284,117	52%	699,710,497	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknik dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perentase perumusan kebijakan teknis yang dilaksanakan	100%	100%	88,962,800	100%	88,962,800	-	97,559,080	-	102,752,034	-	107,589,636	-	113,284,117	100%	699,710,497	
				Tersedianya data organisasi yang memiliki Surat Keterangan Keberadaan Organisasi dan SKT sesuai ketentuan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan	1 kali	-		1 kali	25,403,000	-	27,943,300	-	29,340,453	-	30,807,468	-	32,347,863	1 kali	145,842,116	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		-				103 Orang		105 Orang		105 Orang		103 Orang		420 orang		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan Ormas yang terlaksana	1 kali	-		-		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali		
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Rapat Ten Terpadu Pengawasan Ormas	12 kali	9 kali	86,063,000	12 kali	60,660,000	-	66,726,000	-	70,062,300	-	73,365,415	-	77,243,686	12 kali	434,320,401	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		-				360 Orang		360 Orang		360 Orang		360 Orang		1440 Orang		
				Jumlah Realisasi Koordinasi Pemberdayaan Ormas yang terlaksana		-				12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		48 kali		
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Buku Pondatan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Keahlian dan Profesi	13 buah	13 buah	2,899,600	-	2,899,600	-	3,189,780	-	3,349,269	-	3,516,732	-	3,692,569	30 buah	19,547,951	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	12 laporan	-		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		48 laporan		
	Meningkatnya rasa keadilan berbagai kalangan dan			Perentase penurunan tingkat penyalahgunaan narkoba	Ra	-	0,11%		0,11%		0,12%		0,14%		0,16%		0,53%			
		8.01.06	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perentase peningkatan aparaturnya masyarakat yang memiliki pemahaman sosial dan budaya	15%	15%	393,669,200	15%	393,669,200	-	402,275,720	-	422,389,506	-	443,508,981	-	465,684,430	30%	2,521,197,038	

Tujuan	Besaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Besaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Perangkat Pendanaan												Mondiri Kinerja pada Akhir periode reastra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Perentase konflik keagamaan yang tertangani	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
		8.01.05.2.01	Pertanahan Kebijakan Teknis dan Pemasangan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis yang dilaksanakan	100%	100%	393,669,200	100%	393,669,200	-	402,275,720	-	422,389,506	-	443,608,981	-	465,684,430	100%	2,621,197,038	
				Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan Di daerah dan memantulkannya penyelenggaraan markotika sesuai ketentuan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
		8.01.05.2.01.03	Polaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dialog, Sosialisasi dan Pertemuan Silaturahmi Wadah Komunikasi Umat Beragama Jumlah Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 kali 1 kali	1 kali 0 kali	88,624,000	2 kali 1 kali	88,624,000	-	66,726,000	-	70,062,300	-	73,565,415	-	77,243,686	4 kali 2 kali	464,845,401	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-		-		320 Orang		320 Orang		320 Orang		320 Orang		1280 Orang		
				Jumlah kegiatan fasilitas ketahanan narkoba dan Fasilitas PMGN yang sesuai ketentuan	2 kali	-		-		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali		
				Jumlah kegiatan fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang sesuai ketentuan	1 kali	-		-		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali		
		8.01.05.2.01.04	Polaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	12 kali	12 kali	294,970,000	-	294,970,000	-	324,467,000	-	340,690,350	-	357,724,866	-	375,611,111	24 kali	1,936,433,328	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-		-		924 Orang		924 Orang		924 Orang		924 Orang		3696 Orang		
				Jumlah Koordinasi dan fasilitas pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	12 kali	-		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		48 kali		
				Jumlah Koordinasi dan fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	12 kali	-		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		48 kali		

Tajana	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Aasi Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025					2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	12 laporan	12 laporan	10,073,200	12 laporan	10,073,200	-	11,082,720	-	11,636,856	-	12,218,699	-	12,829,534	24 laporan	67,918,309		
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 laporan	-	-	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	48 laporan			
				Persentase menurunnya potensi konflik di masyarakat	2%	-	-	2%	-	2%	-	2%	-	2%	-	2%	-	10%			
		8.01.06	PROGRAM PENGHIMPUNAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PERINGATAN KUALITAS DAN PASCAKATAKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tercapainya tingkat keamanan dan ketertibatan di wilayah kota banjarbaru	100%	100%	901,727,000	-	901,727,000	-	991,899,700	-	1,036,010,250	-	1,082,326,328	-	1,130,968,209	20%	6,044,648,486		
				Persentase Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertibatan dan keamanan	na	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%			
				Persentase Kewaspadaan Dini Daerah yang tidak menjadi konflik	na	-	-	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%		
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan penuntapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	100%	901,727,000	100%	901,727,000	-	991,899,700	-	1,036,010,250	-	1,082,326,328	-	1,130,968,209	100%	6,044,648,486		
				Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan penuntapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	na	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Sosialisasi Kewaspadaan Dini Daerah terhadap ancaman dan gangguan di daerah	1 kali	1 kali	69,926,000	1 kali	69,926,000	-	58,746,600	-	61,683,930	-	64,768,127	-	68,006,533	2 kali	393,057,189		
				Jumlah Pelatihan Deteksi Dini Di Daerah	1 kali	1 kali	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali			
				Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	323 Orang	-	323 Orang	-	323 Orang	-	323 Orang	-	323 Orang	1300 Orang		

Tujuan	Gasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Aasi Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggang Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Sosialisasi Kewaspadaan Dini Daerah terhadap ancaman dan gangguan di daerah	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	8 kali	-		
				Jumlah Pelatihan Deteksi Dini Di Daerah	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-		-		
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kejasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Pasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat dan penantuan terkait pengawasan orang asing dan keberadaannya orang asing dan tenaga kerja asing dan lembaga asing di kota Banjarmasin	12 kali	9 kali	312,145,000	12 kali	312,145,000	-	359,749,500	-	377,736,975	-	396,623,824	-	416,455,015	21 kali	624,290,000		
				Jumlah Rapat Kewaspadaan Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan Di Daerah	12 kali	9 kali	-	12 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kali	-		
				Jumlah rapat dan pelaporan terkait penanganan konflik sosial di Kota Banjarmasin	12 kali	9 kali	-	12 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kali	-		
				Jumlah rapat dan pelaporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 kali	9 kali	-	12 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kali	-		
				Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	-	-	-	0 kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 kasus	-		
				Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir	-	-	-	6 kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kasus	-		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Pasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	1310 Orang	-	1310 Orang	-	1310 Orang	-	1310 Orang	-	1310 Orang	5240 Orang	-	
				Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	0 kasus	-	-	-	-	0 kasus	-	0 kasus	-	0 kasus	-	0 kasus	-	0 kasus	0 kasus	-	
				Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir	6 kasus	-	-	-	-	6 kasus	-	6 kasus	-	6 kasus	-	6 kasus	-	6 kasus	24 kasus	-	
				Jumlah koordinasi kerjasama intelijen, pemantauan dan pengawasan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta kewaspadaan dini yang	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	48 kali	-	
				Jumlah koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Gangguan Keamanan Daerah yang terlaksana	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	48 kali	-	
				Jumlah koordinasi pembustan peta konflik	-	-	-	-	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	48 Kali	-	
				Jumlah koordinasi kewaspadaan dini masyarakat	-	-	-	-	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	48 Kali	-	
				Jumlah koordinasi kewaspadaan dini pemerintah daerah	-	-	-	-	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	48 Kali	-	
				Jumlah koordinasi pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	-	-	-	-	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	48 Kali	-	

Tujuan	Batasan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Batasan, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kejasaan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring Penanganan Urjuk Rasa/Demo dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah	80 kali	55 kali	98,097,000	60 kali	98,097,000	-	109,588,700	-	109,588,700	-	109,588,700	-	109,588,700	115 kali	634,948,500	21
				Jumlah monitoring pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing	2 kali	-		2 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali		
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-		-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	
				Jumlah Monitoring Penanganan dan pemantauan Urjuk Rasa/Demo dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah	80 kali	-		-	-	70 kali	-	70 kali	-	70 kali	-	70 kali	-	70 kali	280 kali	
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dalam rangka pembahasan kesamaan, keterbacaan, dan stabilitas daerah	12 kali	7 kali	421,539,000	12 kali	421,539,000	-	463,714,900	-	466,900,543	-	511,245,677	-	536,807,961	24 kali	2,841,787,183	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	-		-	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	48 Dokumen	
				Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang terlaksana sesuai ketentuan	12 kali	-		-	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	48 kali	
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan				Klasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79,62	79,65		79,73		79,79		79,85		79,91		79,97		79,97		
				Persentase Peningkatan Klasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,66%	0,05%		0,08%		0,08%		0,08%		0,08%		0,08%		0,43%		
		8.01.01	Program Peningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7,791,989,784	-	7,791,989,784	-	8,351,756,477	-	8,331,379,847	-	8,337,389,464	-	8,468,915,283	100%	49,063,420,638	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kearsifan (kategori)	Na	-		-	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	
				Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Na	-		-	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	
		8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	91,309,800	-	94,609,900	-	104,070,780	-	109,274,319	-	114,738,035	-	120,474,937	100%	634,477,571	
				Terlaksananya fasilitasi dan penyusunan dokumen, penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100%	-		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		

Tujasa	Batasan	Mode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Aasi Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen dan laporan perencanaan dan penganggaran SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	29,859,900	-	29,859,900	-	32,845,890	-	34,488,185	-	36,212,594	-	38,023,223	10 Dokumen	201,289,692	
				Jumlah dokumen perencanaan yang terusun sesuai ketentuan	10 Dokumen	-	-	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Dokumen		
				Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang terusun sesuai dengan ketentuan	10 Dokumen	-	-	-	10 Dokumen	-	10 Dokumen	-	10 Dokumen	-	10 Dokumen	-	10 Dokumen	40 Dokumen		
		8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang terusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	3,660,500	1 Dokumen	4,026,550	1 Dokumen	4,227,878	1 Dokumen	4,439,271	1 Dokumen	4,661,233	5 Dokumen	21,015,434	
		8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terusun	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	3,660,600	1 Dokumen	4,026,660	1 Dokumen	4,227,993	1 Dokumen	4,439,393	1 Dokumen	4,661,362	5 Dokumen	21,016,008	
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ilmiah Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKJ	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	6,475,100	-	7,122,610	-	7,478,741	-	7,852,678	-	8,245,311	1 Dokumen	37,174,439	
				Jumlah Dokumen LPPD dan LKJ yang terusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	4 Dokumen		
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	34 Laporan	34 Laporan	61,449,900	-	50,953,700	-	56,049,070	-	58,851,324	-	61,794,100	-	64,883,805	34 Laporan	297,933,028	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	34 Laporan	-	-	34 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 laporan		
				Jumlah Laporan evaluasi Renstra, Renja dan RPK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	34 Laporan	-	-	-	-	34 laporan	-	34 laporan	-	34 laporan	-	34 laporan	-	136 laporan		
		8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpebuhnya Layanan Administrasi Keuangan di SKPD	100%	100%	6,472,878,484	-	6,472,878,484	-	6,574,915,547	-	6,740,127,645	-	6,877,824,652	-	6,717,567,231	100%	39,663,882,043	
				Terpebuhnya fasilitas dan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
				Cakupan Dokumen penatausahaan keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji, Tunjangan dan BPJS yang dibayarkan	100%	100%	6,464,778,484	-	6,464,778,484	-	6,563,005,547	-	6,739,772,145	-	6,667,701,377	-	6,707,242,792	100%	39,609,278,829	
				Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	30 orang	-	-	30 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang		
				Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	30 orang	-	-	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	30 orang		
				Persentase Gaji dan tunjangan yang dibayarkan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Persentase pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan PNS yang ditanggung SKPD	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Pemertanahan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terfungsinya administrasi keuangan	100%	100%	8,100,000	-	6,500,000	-	7,000,000	-	7,350,000	-	7,717,500	-	8,103,373	12 bulan	44,770,875	

Tujuan	Besaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Tertulisnya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	100%	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	24 Dokumen	-		
				Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu	1 Laporan	-	1 Laporan	1,600,000	-	1,910,000	-	2,005,500	-	2,105,775	-	2,211,064	1 Laporan	9,832,339		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	4 Laporan	-		
				Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang terusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya disiplin sumber daya aparatur	100%	100%	18,000,000	-	33,000,000	-	40,992,600	-	43,042,230	-	45,194,342	-	47,454,059	100%	227,663,230	
				Terpecahnya Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pengadaan Mesin Absen Fingerprint	1 buah	1 buah	18,000,000	-	18,000,000	-	24,492,600	-	25,717,230	-	27,003,092	-	28,353,246	1 buah	141,566,168	
				Pengadaan Pakain Batik Tradisional	30 stel	30 stel	-	-	30 stel	-	-	-	-	-	-	-	60 stel	-		
				Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Unit Pengadaan pakain Khusus Hari-hari tertentu	30 Unit	-	-	-	30 Unit	-	30 Unit	-	30 Unit	-	30 Unit	-	120 Unit	-		
		8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang meningkat wawasannya terkait tugas dan fungsi	3 orang	-	-	7,500,000	3 orang	8,250,000	3 orang	8,662,500	3 orang	9,095,625	3 orang	9,530,406	25 orang	43,058,531		
		8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Meningkatkan Wawasannya terkait Peraturan dan Perundang- undangannya	3 orang	-	-	7,500,000	3 orang	8,250,000	3 orang	8,662,500	3 orang	9,095,625	3 orang	9,530,406	25 orang	43,058,531		
		8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpecahnya Administrasi Umum SKPD	100%	100%	764,626,500	100%	753,863,500	-	839,964,250	-	880,701,963	-	923,487,061	-	968,411,414	100%	5,120,933,687	
				Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	15 buah	-	-	1,565,000	-	1,721,500	-	1,607,375	-	1,897,934	-	1,992,851	15 buah	8,984,880		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-		
				Persentase Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana Belanja	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	-	-	10,000,000	-	11,000,000	-	11,550,000	-	12,127,500	-	12,733,875	1 paket	37,411,375		
				Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai Rencana Belanja	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		

Tujuan	Stratagem	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode rencana perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	6,287,400	-	6,287,400	1 paket	6,916,140	1 paket	7,261,947	1 paket	7,625,044	1 paket	8,006,297	4 Paket	42,384,228	
				Persentase tersedianya peralatan rumah tangga	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
				Pengadaan peralatan rumah tangga	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	-	
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	100%	100%	181,380,000	100%	181,380,000	-	195,068,500	-	204,821,925	-	215,063,021	-	225,816,172	100%	1,203,529,619	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	5 Paket	-	5 Paket	-	5 Paket	-	5 Paket	-	5 Paket	20 Paket	-	
				Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja	100%	-	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan ; Jumlah Penggandaan	1 paket ; 1 tahun	1 paket ; 1 tahun	20,593,100	-	23,006,100	-	15,471,610	-	16,245,191	-	17,057,450	-	17,910,323	100%	110,283,773	
				Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	8 Paket	-	
				Jumlah Cetak yang dilaksanakan	3 paket	-	-	-	3 paket	-	3 paket	-	3 paket	-	3 paket	-	3 paket	3 paket	-	
				Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan	18457 lembar	-	-	-	18497 lembar	-	19247 lembar	-	20521 lembar	-	18457 lembar	-	76682 lembar	76682 lembar	-	
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	6,450,000	-	6,480,000	-	7,128,000	-	7,484,400	-	7,858,620	-	8,251,551	100%	43,682,571	
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1080 eksemplar	-	-	1080 eksemplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1080 eksemplar	-	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	1178 Dokumen	-	1178 Dokumen	-	1178 Dokumen	-	1178 Dokumen	-	1178 Dokumen	471200 Dokumen	-	
				Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja	100%	-	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		8.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tersedianya fasilitas kunjungan tamu	100%	100%	11,000,000	-	7,500,000	-	8,250,000	-	8,562,500	-	9,095,625	-	9,530,406	100%	54,058,531	
				Kunjungan Yang Terfasilitasi	20 kali	-	-	20 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 kali	-	
				Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	10 Laporan	-	10 Laporan	-	10 Laporan	-	10 Laporan	-	10 Laporan	10 Laporan	-	
				Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik	100%	-	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi kabur daerah	12 kali	12 kali	528,785,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kali	528,785,000	
				Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kabur Daerah	20 Laporan	-	-	20 Laporan	517,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Laporan	517,635,000	
				Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana	20 Laporan	-	-	-	20 Laporan	569,398,500	20 Laporan	597,868,423	20 Laporan	627,761,846	20 Laporan	659,149,939	80 Laporan	2,454,178,710	-	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pencatatan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	-	-	-	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	100,000,000	-	
		8.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan PD Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan PD Pemerintah Daerah	100%	100%	133,643,000	-	106,845,000	-	116,429,500	-	122,250,975	-	128,363,624	-	134,781,700	100%	740,213,699	
				Tersedianya Barang Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	

Tujuan	Asasran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggang Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Persentase pengadaan barang milik daerah pemangjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai RKEMD	100%	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	1 paket	-	-	1 paket	35,000,000	-	-	13,500,000	-	13,425,000	-	17,446,250	-	19,568,563	-	1 paket	100,939,813	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	4 Unit	-		
				Persentase tersedianya mebel sesuai RKEMD	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	1 paket	105,949,000	-	70,845,000	-	-	27,929,300	-	31,825,973	-	35,917,274	-	40,213,137	-	1 paket	312,679,856	
				Jumlah Pengadaan Komputer dan Printer Kantor	1 paket	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	-	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	5 Unit	-	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	20 unit	-		
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	4 paket	-		
		8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	100%	26,594,000	-	-	-	-	75,000,000	-	75,000,000	-	75,000,000	-	75,000,000	-	100%	326,594,000	
				Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemangjang Pemerintahan Daerah	100%	100%	118,333,000	100%	120,348,000	-	-	406,688,300	-	144,001,940	-	160,962,037	-	168,249,639	-	100%	1,098,772,916	
				Persentase jasa pemangjang pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	41,363,000	-	39,798,000	-	-	73,777,800	-	45,966,690	-	48,265,023	-	50,678,276	-	12 bulan	299,848,790	
				Pembayaran Jasa Internet	12 bulan	-	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-
				Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-	-	100%	-	94,505,500	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	100%	109,505,500	
				Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai rencana belanja	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	13 bulan	13 bulan	76,970,000	-	80,550,000	-	-	238,605,000	-	93,035,250	-	97,687,013	-	102,571,363	-	13 bulan	689,418,626	
				Pembayaran Jasa Tenaga Honorar/ Pegawai Kontrak	13 bulan	-	-	13 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 bulan	-	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-
				Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertibkannya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	204,400,000	-	211,455,000	-	-	269,505,500	-	282,980,776	-	297,129,814	-	311,986,304	-	100%	1,577,457,393	
				Tertibkannya Barang Milik Daerah SRPD	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	

1	2	3	4	5	6	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		21
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		19	20	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Cakupan Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai rencana	100%	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	-
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terfasilitasinya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan dan kendaraan dinas/ operasional	100%	100%	161,910,000	-	130,415,000	-	143,456,500	-	150,629,325	-	158,160,791	-	166,068,831	100%	910,640,447	
				Jumlah kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharannya	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-	
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharannya sesuai rencana	1 unit	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	1 unit	-	
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan pemeliharannya	17 unit	-	-	17 unit	-	33,550,000	-	36,905,000	-	38,750,250	-	40,687,763	-	42,722,151	17 unit	192,615,163
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terfasilitasi perizinan, pajak dan pemeliharannya sesuai rencana	13 unit	-	-	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	13 unit	-	
				Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100%	-	-	-	100%	36,905,000	-	38,750,250	-	40,687,763	-	42,722,151	-	44,673,804	100%	159,065,163
		8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	87 unit, 4 set	-	-	87 unit, 4 set	-	5,000,000	-	5,500,000	-	5,775,000	-	6,063,750	-	6,366,938	87 unit, 4 set	28,705,688
				Persentase mebel yang dipelihara sesuai rencana	87 unit, 4 set	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	-
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	42,490,000	-	42,490,000	-	46,739,000	-	49,075,950	-	51,529,748	-	54,106,235	100%	286,430,932	
				Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	50 unit	-	-	50 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 unit	-	
				Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	50 unit	-	-	-	50 unit	-	50 unit	-	50 unit	-	50 unit	-	50 unit	50 unit	50 unit	-
				Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	-
TOTAL PAGU INDIKATIF							11,071,251,473		11,071,251,473		13,237,492,157		12,325,876,606		12,445,498,109		12,686,393,378		72,837,763,196	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA